

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa merupakan hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dan lingkungannya. Hasil perpaduan tersebut merupakan suatu perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis, sosial, ekonomis politik, serta kultural setempat dalam hubungan dan pengaruh timbal balik dengan daerah lain. Ada tiga unsur utama desa, yaitu daerah yaitu suatu kawasan perdesaan tentunya memiliki wilayah sendiri dengan berbagai aspeknya, seperti lokasi, luas wilayah, bentuk lahan, keadaan tanah, kondisi tata air, dan aspek-aspek lainnya. Penduduk dengan berbagai karakteristik demografis masyarakatnya, seperti jumlah penduduk, tingkat kelahiran, kematian, persebaran dan kepadatan, rasio jenis kelamin, komposisi penduduk, serta kualitas penduduknya. Tata Kehidupan berkaitan erat dengan adat istiadat, norma dan karakteristik misalnya bekerjasama dalam pelaksanaan kegiatannya dengan budaya lain (Sulistiowati, 2017).

Akuntansi merupakan seni pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran dan pelaporan atas semua transaksi-transaksi yang terkait dengan keuangan yang terjadi dengan suatu cara yang bermakna dan dalam satuan uang. Akuntansi dikatakan suatu seni karena di ibaratkan beberapa pelukis hendak menggambar atas objek yang sama, maka pelukis tersebut akan menggunakan cara sesuai dengan kemampuannya dan minimal akan menghasilkan gambar yang sesuai dengan objek yang digambar. Begitu pula dengan akuntansi, para pelaku biasa

membuat laporan sesuai dengan kemampuannya tetapi tetap berdasarkan pada standar akuntansi yang berlaku. (Maylinda, 2016)

Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik, telah mendorong pemerintah desa untuk menerapkan akuntabilitas publik. Dalam rangka mewujudkan tata kelola yang baik, pemerintah desa harus terus melakukan upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Laporan keuangan merupakan media bagi sebuah entitas, dalam hal ini pemerintah desa untuk mempertanggung jawabkan kinerja keuangannya kepada masyarakat. Pemerintah desa harus mampu menyajikan laporan keuangan yang mengandung informasi yang berkualitas. Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan desa (SAPDes) dijelaskan bahwa laporan keuangan yang berkualitas itu harus memenuhi karakteristik relevan dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Keuangan desa merupakan semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban keuangan desa. Dalam melaksanakan kegiatannya sebuah desa memerlukan pengawalan, maka pemerintah bersama legislatif mengesahkan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa dan Permendagri No.35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintah Desa, maka pemerintah desa memiliki wewenang untuk menyelenggarakan kegiatan pemerintahannya secara luas dan bertanggungjawab.

Pemerintah desa merupakan tingkat pemerintahan terkecil yang berhadapan langsung dengan rakyat maka pemerintah desa dapat membantu pemerintah pusat dalam melaksanakan pembangunan, pelayanan publik dan pemberdayaan kepada masyarakat secara langsung. Kewenangan asli Pemerintah desa merupakan kewenangan utama desa dalam menyelenggarakan rumah tangga desa, sehingga kewenangan desa yang bersifat pelimpahan dan pemberian dari pemerintah atasan, pada dasarnya merupakan kewenangan tambahan karena pemerintahan desa merupakan unit pemerintahan terkecil dalam sistem pemerintahan secara nasional.

Kewenangan pemerintah desa itu meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala desa, serta kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sejalan dengan kewenangan tersebut pemerintah desa diharapkan dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sesuai dengan kewenangan yang diatur oleh Undang-Undang. Untuk melaksanakan kewenangan tersebut pemerintah desa memiliki sumber-sumber penerimaan yang digunakan untuk membiayai kegiatankegiatan yang dilakukan.

Pemerintah desa perlu melakukan pertanggung jawaban atas kegiatankegiatan yang telah dilakukan tersebut dengan menyusun laporan keuangan. Sesuai dengan Nomor 37 Tahun 2014 pasal 12 ayat 3 bagian pertama penatausahaan penerimaan, yaitu bendahara desa wajib mempertanggung jawabkan penerimaan uang yang menjadi tanggung jawabnya melalui laporan

dikatakan bermanfaat jika informasi tersebut mampu dipahami, dapat dipercaya dan digunakan oleh pemakai informasi.

Laporan keuangan adalah suatu cerminan untuk dapat mengetahui apakah suatu pemerintahan telah berjalan dengan baik, sehingga pemerintah diharuskan untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Dimana laporan keuangan yang terdiri dari relevan, andal atau reliabilitas, dapat dibandingkan, dan dapat di pahami. Fenomena yang terjadi saat ini yaitu kurangnya pemahaman tentang akuntansi di beberapa desa yang ada di Kecamatan Ponrang sehingga kualitas laporan keuangan di beberapa desa tersebut tidak sesuai dengan sistem pelaporan keuangan yang telah diatur oleh pemerintah pada umumnya, serta kurangnya penerapan tentang sistem informasi akuntansi mengenai laporan keuangan di beberapa desa tersebut. Laporan keuangan pemerintahan daerah merupakan sesuatu hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Kenyataannya di dalam laporan keuangan pemerintah masih banyak data yang disajikan tidak sesuai dengan realisasi dan terdapat kekeliruan dalam pelaporannya. Alokasi Dana Desa (ADD) setiap tahun disalurkan pemerintah salah satu tujuannya guna menunjang roda pemerintah desa serta untuk pembangunan infrastruktur desa. (Fadrul, 2020)

Atas dasar inilah penulis mengambil judul **Pengaruh Pemahaman Akuntansi dan Sistem Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa (Studi pada Desa Buntu Kamiri, Tirowali, Buntu Nanna di Kecamatan Ponrang).**

pertanggung jawaban penerimaan kepada kepala desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Karena dalam era globalisasi, reformasi, dan tuntutan transparansi yang semakin meningkat, peran akuntansi semakin dibutuhkan, bukan untuk kebutuhan pihak manajemen suatu entitas saja tetapi juga untuk kebutuhan pertanggung jawaban kepada banyak pihak yang memerlukan, salah satu diantaranya adalah pemerintah desa. Pemerintah desa wajib melakukan pengelolaan keuangan serta mempertanggung jawabkan pelaksanaan keuangan sesuai tugas pokok dan fungsinya yang didasarkan pada perencanaan strategis yang telah ditetapkan. Dalam rangka pertanggung jawaban tersebut diperlukan penerapan sistem pelaporan keuangan yang tepat, jelas dan terukur sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Upaya reformasi dan pengembangannya, khususnya dibidang akuntansi pemerintahan yang berkesinambungan sangat diperlukan sehingga terbentuk suatu sistem yang tepat. Proses akuntansi atau tata keuangan telah mengalami perkembangan seiring dengan kemajuan sistem keuangan modern. Institusi-institusi pemerintahan saat ini harus semakin memperbaiki kualitas kinerja keuangan agar mampu mengikuti perkembangan akuntansi karena pengguna informasi terutama masyarakat umum menuntut peningkatan akuntabilitas dan transparansi di institusi-institusi pemerintahan. Pemerintah desa mempunyai kewajiban mempublikasikan informasi melalui laporan keuangan yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Dengan demikian, publikasi informasi tersebut dapat digunakan untuk kepentingan para pemakai informasi. Informasi

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah pemahaman Akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Desa di kecamatan Ponrang?
2. Apakah penerapan sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Desa di kecamatan Ponrang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah penulis paparkan, maka tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman Akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Desa di kecamatan Ponrang.
2. Untuk mengetahui pengaruh Sistem Informasi Akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Desa di kecamatan Ponrang.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoretis

Diharapkan dari tulisan ini untuk dapat mengembangkan dan menerapkan teori agensi, dalam penelitian pemerintahan Desa Kecamatan Ponrang, dimana pemerintah desa dalam hal ini sebagai agen memiliki kewajiban terhadap Principal yaitu para pengguna laporan keuangan pemerintah desa kecamatan ponrang, dari kewajiban itu, pemerintah desa dituntut untuk memberikan informasi dari laporan keuangan yang berkualitas yaitu laporan keuangan yang sesuai dengan SAP, oleh karena itu dengan adanya pemahaman terhadap SAP serta pemanfaatan SIA, diharapkan pemerintah desa akan dapat memberikan informasi dalam bentuk laporan keuangan desa yang berkualitas.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan data empiris bagi ilmu akuntansi sektor publik terutama tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Desa dan Sistem Informasi akuntansi. Dan juga diharapkan mampu memberikan pengetahuan tambahan tentang pemaham SAPDes dan sistem informasi akuntansi, dan menjadi rujukan untuk para akademisi dan bagi peneliti selanjutnya untuk mengembangkan penelitian dibidang yang sama. Selain itu dengan adanya penelitian ini juga diharapkan dapat menghimpun informasi sebagai bahan sumbangan informasi bagi Pemerintah Desa di Kecamatan Ponrang guna meningkatkan Kualitas dan Kinerja dalam penyusunan Laporan Keuangan Desa di Kecamatan Ponrang.

1.5 Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

Pembatasan masalah dilakukan agar penelitian terfokus pada pokok permasalahan yang ada beserta pembahasannya, sehingga diharapkan penelitian tidak akan menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan, oleh karena itu peneliti membatasi penelitian ini pada :

1.5.1 Ruang lingkup

Penelitian ini hanya berhubungan dengan pengaruh pemahaman akuntansi dan kualitas laporan keuangan Desa di Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu yang menjadi subjek pada penelitian.

1.5.2 Batas Penelitian

Penelitian dilakukan ditiga kantor desa yang terdapat di Kecamatan

Ponrang sebagai sampel yang di ambil dalam penelitian ini. Dan hanya melakukan penelitian tentang pengaruh pemahaman akuntansi dan sistem informasi terhadap kualitas laporan keuangan desa saja.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pemahaman Akuntansi

2.1.1 Pengertian Akuntansi

Menurut (Maylinda, 2016) definisi akuntansi merupakan suatu seni pada suatu transaksi yang telah terjadi dengan cara mencatat, mengiktisar, menggolong dan pelaporan. Kegunaan dari hal tersebut adalah untuk meningkatkan kualitas suatu laporan keuangan menjadi lebih baik supaya bermanfaat kepada pengguna informasi dalam mengambil keputusan.

(Diani, 2014) menyatakan bahwa akuntansi merupakan suatu pelaporan keuangan yang disusun oleh pihak manajemen sesuai standar akuntansi yang dijadikan pertanggungjawaban kepada pemilik atas dana perusahaan. Pemilik dana dapat mengetahui arus kas yang sedang di investasikan diperusahaan tersebut sedang mengalami keuntungan atau kerugian. Akuntansi memiliki definisi sebagai suatu teknik atau perangkat sistem dalam mengukur dan mengelola aktivitas transaksi keuangan perusahaan yang mampu menghasilkan informasi dari kegiatan dimana informasi tersebut membantu berbagai pihak internal maupun eksternal dalam mengambil keputusan. Salah satu tujuan dari akuntansi adalah menciptakan laporan keuangan dan informasi yang bermanfaat pada pengguna yang membutuhkan baik pihak eksternal maupun internal mengenai kegiatan suatu perusahaan serta mampu mengurangi kesalahan yang telah terjadi.